

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI DI KECAMATAN DAMAU
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
(Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud)**

*Virginia Patrisia Saluman¹
Sofia Pangemanan²
Gustaf Undap³*

Abstrak

Kebijakan merupakan sebuah agenda yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan sebuah tatanan pemerintahan, dalam analisis kebijakan publik dikenal dengan istilah penyusunan agenda melalui identifikasi masalah kebijakan. Penyusunan tersebut merupakan langkah untuk menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi pada publik, artinya kehadiran sebuah kebijakan dianggap sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada aspek organisasi, yang memainkan peran sebagai aktor dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah secara tunggal kewenangannya ada pada UPTD Pertanian Kecamatan Damau. Tidak berjalan sebagai mana regulasi yang ada di mana haruslah memanfaatkan jalinan kerjasama dengan kios-kios pengencer yang telah ditunjuk dan dipercayakan oleh pihak pemerintah sendiri. Kemudian dilihat juga dari struktur organisasi yang ada di UPTD Pertanian Kecamatan Damau masih minimnya personil yang berperan terlebih khusus pada bagian staf-staf bidang UPTD Pertanian. Serta secara pangkat golongan masih ada yang belum sesuai dengan standar ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Ketahanan pangan nasional perlu ditunjang dengan peningkatan pertanian dimulai dari sektor pertanian terkecil yaitu berawal dari pedesaan. Salah satu faktor pendukung tercapainya peningkatan laba pertanian adalah tersediannya pupuk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan para petani dalam meningkatkan hasil pertanian. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani. Pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi tanamnya. Penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang secara historis menjadi tulang punggung kebijakan subsidi pertanian di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam meningkatkan produktifitas dan produksi hasil pertanian adalah pupuk. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan berbagai resolusi/deregulasi kebijakan dibidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Permendag nomor 15/MDAG/ PER/4/2013 Tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian, dalam pasal 1 ayat 1 pupuk bersubsidi adalah

barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan. Kecamatan Damau adalah salah satu kecamatan yang ada di pulau kabaruan yang terdiri dari 6 (enam) desa. Sebagian besar warga masyarakat di kecamatan Damau bermata pencaharian sebagai petani yang menghasilkan berbagai macam hasil pertanian, seperti pala, cengkih, dan kelapa. Untuk menunjang produktifitas petani, perlu ditunjang dengan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi agar dapat mencapai masyarakat yang sejahtera. Untuk proses pengelolaannya secara umum masih serba manual, mulai dari penanaman bibit, pemeliharaan, dan pemanenan. Tentunya ini menjadi penghasilan utama masyarakat yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari setiap masyarakat.

Dalam implementasinya, kebijakan yang diterapkan pemerintah belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam prakteknya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sering mengalami keterlambatan dan pembagian pupuk tidak merata dimasing-masing desa. Maka dengan ini tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa seluruh proses pengadaan dan penyaluran yang tepat dalam menjawab permasalahan yang terjadi menyangkut pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang ada dikecamatan Damau. Di kecamatan Damau salah satunya di desa Damau, dalam pengelolaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi tidak berjalan dengan baik karena pupuk yang dikirim dari kabupaten tidak langsung disalurkan ke kecamatan yang selanjutnya dari kecamatan diteruskan kepada kelompok tani di tiap-tiap desa. Sehingga berdampak bagi petani yang menyebabkan gagal panen diakibatkan karena terhambatnya proses penyaluran pupuk tersebut. Hal ini yang menjadi fokus pemerintah dalam mendorong sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal konkrit yang perlu dan sedang dikembangkan yaitu melalui pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah setempat.

Tinjauan Pustaka

Jones, (1984:296), mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dalam pelaksanaannya di lapangan, ditentukan atau bergantung pada tiga hal yaitu sebagai berikut:

pertama: organisasi merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program; kedua: interpretasi berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan; dan ketiga: penerapan merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrumen program. Menurut George C Edward III (dalam Winarno, 2004:125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka

kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Selanjutnya Menurut George ada empat factor atau variabel kritis yang dianggap dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

Komunikasi, bahwa keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personil yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi membutuhkan keakuratan dan secara akurat pula diterima oleh implementor serta konsisten agar implementasi kebijakan efektif.

Sumber daya, bahwa komando implementasi yang ditransmisikan kepada implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila Resources yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak memadai maka implementasi tidak efektif. Resources yang diperlukan tersebut termasuk staf/personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan, persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik.

Disposisi atau sikap implementor, di mana proses implementasi kebijakan yang efektif bukan hanya mempertimbangkan kemampuan implementor tetapi juga sikap di mana mereka berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

Struktur birokrasi, implementasi kebijakan dalam struktur birokrasi yang tidak efisien, yang memerlukan kerjasama dengan sejumlah besar personil, tidak adanya koordinasi akibat adanya fragmentasi organisasi menyebabkan terbuangnya resources

secara percuma, menciptakan keraguan, menghambat terjadinya perubahan, serta mengabaikan fungsi penting yang ada.”

Merille S. Grindle dikutip dari Nugroho (2014:221) mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut sebagai kemampuan implementasi. Dalam hal isi, terkait dengan kepentingan public yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan, pengimplementasi kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Hadari Nawawi (2007 : 33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Danim (2002:41) memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif, yaitu: bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak

untuk mencari hubungan antarvariabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan; dilakukan secara survey. Oleh karena itu, penelitian deskriptif sering disebut juga sebagai penelitian survey. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali bersifat historis dan eksperimental; bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail; mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung; mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. (Arikunto, 2008:128) cara yang digunakan untuk menentukan informan tersebut adalah menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian yaitu:

1. Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Damau
2. Camat Kecamatan Damau
3. Kepala Desa Damau
4. Ketua Kelompok Tani “Barter” Desa Damau Bowone
5. Ketua Kelompok Tani “Buwun” Desa Taduware
6. Ketua Kelompok Tani “Matuari” Desa Peret
7. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani (di luar kelompok tani: 3 orang)

Yang akan menjadi focus dalam penelitian ini adalah bagaimana

Implementasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan damau kabupaten kepulauan Talaud dilihat dari: Organisasi, merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program pengadaan dan penyaluran; Interpretasi, berusaha menafsirkan supaya program pengadaan dan penyaluran menjadi rencana-rencana dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan; Penerapan, merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrumen program pengadaan dan penyaluran.

Hasil Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini penulis sendiri berpijak dan bertitik tolak dari teori yang dikemukakan oleh Jones (1984:296), dimana diungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dalam pelaksanaan di lapangan, ditentukan atau bergantung pada tiga hal yaitu sebagai berikut: Aspek organisasi, merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program; Aspek interpretasi, berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana yang dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan; dan Aspek penerapan, merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrumen program.

Organisasi merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Secara umum, pengertian organisasi

merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi terdapat struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Demikian pula dalam upaya merealisasikan implementasi pengadaan dan penyaluran pupuk di Kecamatan Damau, pemerintah memuat tatanan dalam struktur organisasi dan tata kerja dalam proses kerja dan penyalurannya dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan di mana dalam hal ini penulis pengambil wilayah penelitian di Kecamatan Damau lebih spesifiknya lagi pada UPTD Pertanian Kecamatan Damau. Berkenaan dengan aspek organisasi di sini penulis mencoba melihat aspek ini berdasarkan dua perspektif. Pertama penulis mencoba melihat dari sisi proses penyalurannya; kedua aspek organisasi ini dilihat dari skope penelitian yang diusahakan penulis. Apabila dilihat dari perspektif proses penyalurannya maka organisasi maupun aktor-aktor yang turut berperan di dalamnya yakni Kementerian Pertanian sebagai Lini I, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Lini II, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagai Lini III, dan UPTD Pertanian Kecamatan Damau sebagai Lini IV.

Dalihat dari skope penelitian yang coba diteliti oleh penulis secara spesifik difokuskan pada Lini IV yakni UPTD Pertanian Kecamatan Damau. Dari struktur organisasi yang ada di UPTD Pertanian Kecamatan Damau penulis susunan sebagai berikut: ada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Damau (tentunya 1 orang), ada Koordinator

BP3K (1 orang), ada Staf Pertanian/Ketahanan Pangan (1 orang), ada Staf Administrasi (1 orang), ada Staf Pertanian dan Peternakan (1 orang). Dilihat dari jumlah personil yang ada maka dapat disimpulkan bahwa keanggotaan yang ada cukuplah minim. Belum lagi melihat pangkat golongan dari para pesonil yang tergabung dalam struktur organisasi. Di mana untuk Staf Pertanian/Pertanian masih ditangani oleh pihak yang masih ada pada golongan II B yang secara ketentuan pemerintah belum memenuhi syarat dan standarisasi yang ada. Maka untuk SDM dalam organisasi UPTD Pertanian di Kecamatan Damau belum mencapai standar dan ketentuannya. Ditambah lagi jumlah personil yang ada belum mencapai ketentuan kuotanya. Sehingga di sini penulis menemukan tantangan menimnya tenaga pengelola yang berperan dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Sesuai dengan pengertiannya interpretasi merupakan penafsiran agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dirasakan. Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat pada poin ini adalah apakah kebijakan implementasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Damau sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian yang meregulasi ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dilihat dari hasil penelitian yang coba dikemas oleh penulis lewat wawancara dan tinjauan maka proses pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Damau belum terjadi secara maksimal dan sebagaimana mestinya diatur oleh pemerintah. Pertama dilihat dari segi aktor yang berperan dalam pengadaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi hanyalah aktor tunggal di mana kewenangan tersebut hanyalah sejauh ini ditangani sendiri oleh pihak UPTD Pertanian Kecamatan Damau. Di mana dari segi regulasinya sebenarnya proses penyaluran yang terjadi pada Lini IV (untuk wilayah kecamatan dan desa) adalah harus bekerjasama dengan kios-kios pengencer. Berikut dilihat dari segi agenda penanganan program kerja yang ada berdasarkan aspek geografis yang membutuhkan sarana transportasi antar pulau; pemerintah belum maksimal untuk mengadakan pupuk bersubsidi tersebut pada saat musim tanam. Kemudian lemahnya juga proses sosialisasi dari pihak pemerintah menjadi indikator yang penting dalam memaksimalkan proses penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Damau.

Penerapan merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat apakah peraturan atau kebijakan implementasi pupuk bersubsidi di Kecamatan Damau berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan tinjauan langsung terhadap beberapa informan dan UPTD Pertanian di Kecamatan Damau dalam hal ini kepala UPTD Kecamatan Damau dapat dilihat bahwa meskipun di beberapa sisi ditemukan kegagalan dan ketakterhindaran pada tantangan-tantangan yang ada namun harus dikatakan pada intinya implementasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Damau terlaksana. Lewat terlaksananya program ini memunculkan reaksi terhadap masyarakat untuk membentuk ikatan bersama lewat kelompok-

kelompok tani yang ada untuk mengusahakan komoditi-komoditi pertanian yang mereka kembangkan. Meskipun pada sisi lain harus dicatat juga bahwa dari segi ketentuan dan regulasi belum berjalan berdasarkan ketentuan dan peraturan baik dari Kementerian Pertanian secara spesifik Dirjen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian serta ketentuan penyaluran dari Kementerian Perdagangan.

Pada intinya dapat digariskan bahwa dari segi kesesuaian dengan ketentuan dan regulasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian pun dari segi pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut belum dilaksanakan seperti aspek sosialisasi dan perluasan wawasan dalam bidang pertanian terhadap kelompok-kelompok tani yang ada di Kecamatan Damau.

Kesimpulan

1. Dilihat dari hasil penelitian yang coba dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Damau dalam hal ini di wilayah penanganan UPTD Pertanian Kecamatan Damau didapati:
2. Pada aspek organisasi, yang memainkan peran sebagai aktor dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah secara tunggal kewenangannya ada pada UPTD Pertanian Kecamatan Damau. Tidak berjalan sebagai mana regulasi yang ada di mana haruslah memanfaatkan jalinan kerjasama dengan kios-kios pengencer yang telah ditunjuk dan dipercayakan oleh pihak pemerintah sendiri. Kemudian dilihat juga dari struktur organisasi yang ada di UPTD Pertanian Kecamatan Damau masih minimnya personil yang berperan terlebih

khusus pada bagian staf-staf bidang UPTD Pertanian. Serta secara pangkat golongan masih ada yang belum sesuai dengan standar ketentuan yang ada.

3. Pada aspek interpretasi, harus diakui pertama-tama bahwa program pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini terlaksana. Lepas dari apakah itu terlaksana secara maksimal dan optimal. Keberhasilannya yakni sejauh program itu terealisasi di Lini IV wilayah kecamatan dan kelurahan.
4. Pada aspek penerapan, dapat ditemukan bahwa meskipun dengan tantangan geografis dan jenis komoditi yang diusahakan oleh kelompok-kelompok tani, namun setidaknya lewat program ini cukup merangsang oleh para petani yang ada di Kecamatan Damau untuk membentuk ikatan kerjasama dengan tujuan yang sama yakni membentuk kelompok-kelompok tani. Kemudian pemerintah dalam hal ini UPTD Pertanian Kecamatan Damau telah memberikan bantuan berupa pupuk bersubsidi kepada para kelompok tani tersebut untuk memproduksi komoditi-komoditi pertanian mereka.

Saran

1. Sehubungan dengan aspek organisasi, penulis memberikan rekomendasi tertulis untuk memberi perhatian pada masalah pemaksimalan personil yang berperan pada UPTD Pertanian Kecamatan Damau. Secara khusus memenuhi ketentuan tenaga staf yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga memberikan kewenangan kepada pihak-pihak yang perlu dijalin kerjasamanya seperti kios-kios pengencer agar mencegah

- proses pelaksanaan kebijakan yang keliru.
2. Berkaitan dengan aspek interpretasi, pemerintah harus secara bijaksana untuk memanfaatkan peluang di tengah tantangan geografis. Secara lebih real mengagendakan percepatan proses distribusi pupuk bersubsidi agar tidak membuat para petani harus menunggu bahkan melewati masa tanam.
 3. Dalam rangka perbaikan pada aspek penerapan, perlu adanya pengawasan yang secara nyata terhadap pelaksanaan kebijakan baik dari pihak Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Talud ke pihak UPTD Pertanian Kecamatan Damau agar terjadi proses monitoring dan evaluasi untuk memaksimalkan dan menilai hasil-hasil kerja yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S., 2008, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Faried. 2012. Studi Analisa Kebijakan, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Solichin, Wahad. 2014. Analisis Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Edy, Sutrisno. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Jones, Charles, O, 1984, An Introduction to The Study of Publik Policy: Third Edition, California, Brooks/ Cole Publishing Company.
- Arikunto, 2008. Prosedur penelitian, Jakarta: PT Rineke Cipta
- Kusumanegara, S, 2010, Model dan Aktor dalam proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gava Media
- Edward III, George, 2004, Implementasi Kebijakan. Winarno, (125)
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadari, Nawawi. 2007. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Alfabeta, cv.
- Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk dan Prestisida Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2014.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.